



PEMERINTAH KOTATOMOHON
PANITIA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON KELURAHAN WOLOAN SATU KECAMATAN
TOMOHOON BARAT KOTA TOMOHON

KODE POS 95421

PENGUMUMAN
NOMOR : 810.04/PAN-CPPPK/TMHN-2024
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHAP DUA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTATOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2024

Merujuk Surat Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Nomor: 810.01/PAN-CPPPK/TMHN-2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, maka dengan ini disampaikan Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Tomohon tahap 2 (dua) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Tahap 2 pelamar diperuntukkan bagi **Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah Kota Tomohon paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus – menerus;**
2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru Tahap 2 pelamar diperuntukkan bagi **Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus – menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.**
3. Alokasi kebutuhan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut:

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

a. Tenaga Guru

N O	LOKASI FORMASI	JABATAN	ALOKAS I FORMA SI
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	3
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	2
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	8
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	4
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	3
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	4
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	2
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	4
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	1
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	1
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	2
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	2
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	10

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

b. Tenaga Fungsional Teknis

NO	JABATAN	NAMA PENDIDIKAN	DAPAT DI ISI DISABILITAS	ALOKASI FORMASI	LOKASI FORMASI
1	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	5	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
3	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH UPTD BALAI BENIH IKAN
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	TIDAK	3	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN
5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES TINOOR

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

6	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
7	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SMP NEGERI 1 TOMOHON
8	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	KECAMATAN TOMOHON TIMUR SEKRETARIAT KECAMATAN TOMOHON TIMUR SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
9	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG LINMAS DAN SUMBER DAYA APARATUR SEKSI PELATIHAN DASAR DAN TEKNIS FUNGSIONAL
10	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

					PENILAIAN KINERJA APARATUR
11	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SMP NEGERI 4 TOMOHON
12	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN
13	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES KUMELEMBUI
14	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS SOSIAL DAERAH SEKRETARIAT DINAS SOSIAL SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	TIDAK	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SEKSI KERJASAMA
16	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	TIDAK	1	SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

					SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
17	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
18	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES LAHENDONG
19	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK	TIDAK	14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
20	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES WOLOAN DUA
21	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

22	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	TIDAK	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG ANGGARAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN
23	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	TIDAK	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
24	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	TIDAK	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
25	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES PERUMNAS ULUINDANO
26	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI
27	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS SOSIAL DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

28	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES KAKASKASEN SATU
29	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
30	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES TUMATANGTANG
31	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS SOSIAL DAERAH BIDANG REHABILITASI SOSIAL
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	INSPEKTORAT SEKRETARIAT INSPEKTORAT SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
33	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD NEGERI LAHENDONG

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

34	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI	TIDAK	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
35	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	7	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
36	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
37	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS TENAGA KERJA DAERAH SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA SUB BAGIAN KEUANGAN ASET DAN PELAPORAN
38	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK	TIDAK	7	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

39	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI	TIDAK	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
40	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES WAILAN
41	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
42	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES WALIAN
43	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES KINILOW
44	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK ELEKTRO	TIDAK	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

					KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
45	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES KAKASKASEN DUA
46	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
47	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT - SLTA KEJURUAN - SMK	TIDAK	9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
48	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	KECAMATAN TOMOHON TIMUR SEKRETARIAT KECAMATAN TOMOHON TIMUR SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
49	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES TARATARA SATU

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

50	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM
51	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES KAYAWU
52	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	TIDAK	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
53	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS TENAGA KERJA DAERAH BIDANG ENERGI
54	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	TIDAK	2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
55	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD NEGERI 2 TOMOHON
56	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

					SD NEGERI SARONGSONG
57	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI	TIDAK	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG LINMAS DAN SUMBER DAYA APARATUR SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
58	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON BAGIAN KEUANGAN, FASILITASI, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
59	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SMP NEGERI 2 TOMOHON
60	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	TIDAK	1	SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
61	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH BIDANG PERDAGANGAN
62	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	KECAMATAN TOMOHON TIMUR SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

63	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT - SLTA KEJURUAN - SMK	TIDAK	9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
64	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	TIDAK	1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
65	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	YA	10	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
66	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES PINARAS
67	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM	TIDAK	1	SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHOH BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

68	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES RURUKAN
69	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
70	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
71	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SMP NEGERI 3 TOMOHON
72	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES TARATARA 2
73	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

74	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
75	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES LANSOT
76	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES KAKASKASEN TIGA
77	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	TIDAK	2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

4. Persyaratan

A. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Usia Paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun dan khusus Guru paling tinggi 59 (lima puluh pada saat mendaftar;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/ TNI/ Polri;
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

- g. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lainyang ditentukan oleh Pemerintah
- h. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang dilamar;
- i. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- j. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

B. Persyaratan Wajib

1. Tenaga Fungsional Teknis

- a. Tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah Kota Tomohon paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus – menerus;
- b. Setiap Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 - 2) Paling singkat 2(dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, ahli pertama;
 - 3) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.

2. Tenaga Fungsional Guru

- a. Guru Non ASN yang aktif mengajar di Pemerintah Kota Tomohon;
- b. Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) Tahun atau 4 (empat) semester secara terus – menerus di Instansi tempat mengajar saat mendaftar.

3. Khusus pelamar pada Formasi Pemula Pemadam Kebakaran:

- a. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
- b. Surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah.

5. Persyaratan/ dokumen yang diunggah ke dalam SSCASN terdiri dari;

- a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Walikota Tomohon (format terlampir)
- b. KTP elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
- d. Ijazah asli;
- e. Transkrip nilai asli;
- f. Surat pernyataan (format terlampir);
- g. Sertifikat Pendidikan asli (jika ada) untuk tenaga guru;
- h. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d. 8 (delapan) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar;

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
 - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.
-

- i. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus ;
- j. Khusus untuk pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi khusus disabilitas wajib melampirkan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan melampirkan bukti video tentang kegiatan keseharian (ukuran file maximal 1MB);
- k. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis formasi jabatan;
- l. Pelamar bisa menggunakan e-materai yang terintegrasi dengan Perum PERURI atau menggunakan materai konvensional untuk dokumen yang menggunakan materai;
- m. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN BKN dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik (persyaratan diunggah jelas,tidak buram dan terbaca);
- n. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilakukan melalui portal pendaftaran online (sscasn.bkn.go.id) dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> **Jadwal Terlampir**;
- o. Portal resmi seleksi ASN T.A 2024 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>;
- p. Hal-hal lain yang belum jelas dapat menghubungi *helpdesk* SSCASN;
- q. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;
- r. Seluruh proses seleksi penerimaan calon ASN Pemerintah Kota Tomohon dilakukan secara terbuka dan tanpa biaya apapun, apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam motif apapun maka hal tersebut merupakan penipuan dan diluar tanggung – jawab panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.Terima kasih.

Tomohon, 12 November 2024
Ketua Panitia
Sekretaris Daerah
Kota Tomohon,

Edwin Roring, S.E., M.E
Pembina Utama Madya
NIP. 19690823 199603 1 003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pjs. Wali KotaTomohon;
4. Kepala kantor Regional XI BKN Manado.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
 - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.
-

Lampiran I Pengumuman Panitia Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Tomohon

Nomor : 810.04/PAN-CPPPK/TMHN-2024

Tanggal : 12 November 2024

Tentang : Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahap 2 (dua) Tahun Anggaran 2024

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A.2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah)

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah(*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah(*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan(**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NIPPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NIPPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan :

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

Lampiran II Pengumuman Panitia Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Tomohon

Nomor : 810.04/PAN-CPPPK/TMHN-2024
Tanggal : 12 November 2024
Tentang : Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahap 2 (dua) Tahun Anggaran 2024

CONTOH SURAT LAMARAN

PERIHAL : PERMOHONAN

TOMOHOON,2024
KEPADA YTH:
WALIKOTA TOMOHOON
C.q PANITIA PELAKSANA SELEKSI
PENERIMAAN PPPK TAHUN 2024
DI-
TEMPAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat lahir (kab/kota) :
Tanggal lahir :
Pendidikan/jurusan :
Formasi jabatan yang dilamar :
Lokasi penempatan formasi :
Alamat domisili :
Nomor telp/ wa :
Email aktif :

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Walikota kiranya saya dapat diterima sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon

Sebagai bahan pertimbangan, saya telah mengunggah ke dalam portal SSCASN dokumen sebagai berikut:

1. File Pas foto 4x6 warna (latar belakang merah);
2. File Asli ijazah;
3. File Asli Transkrip Nilai;
4. File Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik/ Surat Keterangan Asli;
5. Surat Pernyataan bermeterai cukup;
6. Surat pengalaman kerja;
7. Dan persyaratan lain yang dibutuhkan.

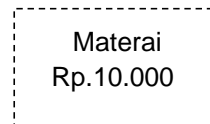
Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan data yang saya berikan tidak benar, maka saya akan menerima keputusan pembatalan kelulusan saya pada seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dan bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat lamaran ini dibuat untuk dapat dipertimbangkan, atasnya diucapkan terima kasih.

Yang bermohon



NAMA LENGKAP

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
 - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.
-

Lampiran III Pengumuman Panitia Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Tomohon

Nomor : 810.04/PAN-CPPPK/TMHN-2024
Tanggal : 12 November 2024
Tentang : Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahap 2 (dua) Tahun Anggaran 2024

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara republic Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Tomohon2024

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp.10.000

NAMA LENGKAP

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.